

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA PERAN DAN FUNGSI PUSAT PERTUMBUHAN KOTA

2.1 Konsep Pengembangan Wilayah dan Kota

2.1.1 Konsep Wilayah

Secara geografi wilayah dapat diartikan sebagai kesatuan alam yang terdapat kesamaan atau homogenitas serta kesatuan manusia yang terdiri dari penduduk atau masyarakat dan adanya karakteristik khas kebudayaan yang dapat dibedakan dengan wilayah lain (Jayadinata, 1999). Dalam menentukan atau menetapkan suatu wilayah dapat digunakan beberapa cara pengelompokkan berdasarkan tujuan pembetukan wilayah tersebut yang disampaikan oleh Tarigan (2005), yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan. Terdapat beberapa pembagian wilayah yang memiliki pemerintahan yang terpisah, seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan dusun/lingkungan.
2. Berdasarkan persamaan karakteristik wilayah atau homogenitas. Contoh yang paling umum adalah kesamaan kondisi fisik.
3. Berdasarkan ruang lingkup pengaruh ekonomi. Pada awal ditentukan pusat pertumbuhan yang diurutkan berdasarkan fungsi dan ditetapkan batas dari pengaruh pelayanan pusat pertumbuhan tersebut.
4. Berdasarkan wilayah perencanaan/program. Dalam hal ini ditetapkan batas wilayah ataupun daerah yang terkena suatu program/proyek dimana wilayah tersebut termasuk ke dalam suatu perencanaan untuk tujuan khusus.

2.1.2 Konsep Kota

Kota secara umum dapat diartikan sebagai wilayah dengan pemusatan atau konsentrasi penduduk beserta kegiatan yang ada di dalamnya seperti ekonomi, sosial, budaya serta administrasi pemerintahan (Adisasmita, 2006). Kota memiliki nilai kepadatan penduduk yang tinggi serta terdiri dari persentase lahan terbangun

yang lebih tinggi dengan fungsi kegiatan ekonomi ataupun non pertanian. Kota dalam pandangan aspek sosial ekonomi memiliki beberapa karakteristik, yaitu: (a) persentase penduduk yang relatif lebih tinggi dengan daerah sekitarnya, (b) memiliki kepadatan penduduk yang relatif tinggi dengan daerah sekitarnya, (c) persentase jumlah penduduk di bidang non pertanian lebih tinggi atau lebih banyak dibandingkan daerah sekitarnya (d) menjadi pusat aktivitas atau kegiatan dalam bidang ekonomi serta menjadi pusat dalam menyalurkan kegiatan pertanian dengan daerah sekitarnya serta tempat proses serta pemasaran bahan baku bagi industri (Inmendagri Nomor 34 tahun 1986).

Pada tahun 2000 Badan Pusat Statistik melakukan survei status desa/kelurahan dan menggunakan beberapa standar dalam penentuan suatu desa/kelurahan dapat disebut desa atau kota. Standar yang digunakan adalah: (1) Kepadatan penduduk per kilometer persegi, (2) Persentase rumah tangga yang mata pencaharian utamanya adalah pertanian atau non pertanian, (3) Persentase rumah tangga yang memiliki telepon, (4) Persentase rumah tangga yang menjadi pelanggan listrik, (5) Fasilitas umum yang ada di desa/kelurahan.

Kota dapat dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan jumlah penduduk di dalamnya: (1) kota kecil, dengan jumlah penduduk 20.000-50.000 jiwa; (2) kota sedang, dengan jumlah penduduk 50.000-100.000 jiwa; (3) kota besar, dengan jumlah penduduk 1.000.000-10.000.000 jiwa (Daljoeni, 1998). Pada penelitian ini sesuai dengan ciri-ciri tersebut di atas, Kota Metro merupakan kota sedang dengan jumlah 165.193 penduduk.

2.2 Peran dan Fungsi Kota

2.2.1 Peran Kota sebagai Pusat Pertumbuhan

Peran kota adalah beban kegiatan perkotaan yang diberikan pada suatu kota yang dikaitkan dengan wilayah belakangnya (Rondinelli & Ruddle, 1978). Suatu kota dapat dikatakan berperan tidak hanya dilihat berdasarkan jumlah penduduk atau ukuran kota tersebut melainkan dilihat dengan adanya aksesibilitas dari kota menuju daerah di sekitarnya atau daerah di belakangnya (*hinterland*). Selain hal tersebut terdapat beberapa peran kota yaitu sebagai berikut:

- a. Merupakan penyedia lokasi bagi kepentingan desentralisasi fasilitas pelayanan publik skala lokal sehingga meningkatkan aksesibilitas antara kota dengan wilayah belakangnya.
- b. Menciptakan kondisi kondusif bagi perdagangan dari daerah belakangnya.
- c. Sebagai pusat transportasi dan telekomunikasi yang menghubungkannya dengan kota-kota di sekitarnya.
- d. Memberikan iklim kondusif bagi pertumbuhan industri, yang dapat berfungsi melayani pasar lokal, permintaan internal dan eksternal dengan baik.

Peran kota dapat diartikan sebagai hasil hubungan dan ketergantungan antara desa dan kota, seperti pada tabel berikut ini (Douglass, 1996).

TABEL II.4 KETERKAITAN DESA DAN KOTA

Kota	Desa
1. Pusat Transportasi/Perdagangan	1. Produksi Pertanian
2. Pelayanan pendukung pertanian	2. Intesifikasi pertanian
Input produksi	Infrastruktur pedesaan
Pelayanan Privat	Insentif produksi
Informasi Terhadap Metode Produksi	Pendidikan dan kapasitas meyerap inovasi
Budaya modern	
Gaya hidup konsumtif	3. Pendapatan & permintaan pedesaan untuk barang dan jasa non pertanian
3. Pasar Perbelanjaan non pertanian	

Sumber: Douglass, 1996

Kota dapat berperan bagi daerah sekitarnya apabila terdapat pengaruh yang dapat diberikan kota tersebut kepada wilayah atau daerah lainnya. Salah satu peran sebuah kota yaitu sebagai pusat pertumbuhan, diharapkan dengan adanya pusat pertumbuhan tersebut dapat memberikan kontribusi atau pengaruh bagi daerah disekitarnya. Konsep ini juga berasal dari konsep *Development From Above* yaitu pengembangan dari suatu inti atau pusat yang diharapkan memberikan *trickling down effect* kepada daerah di sekitarnya. Teori pusat pertumbuhan atau *growth pole theory* merupakan konsep yang digunakan dalam pengembangan wilayah dengan berlandaskan konsep ruang ekonomi dan dikemukakan oleh Francois Perroux.

Teori menjadi salah satu strategi kebijakan pembangunan suatu daerah yang diterapkan di berbagai wilayah. Dalam teorinya dinyatakan bahwa suatu pembangunan atau pertumbuhan tidak dapat terjadi di setiap tata ruang secara keseluruhan, akan tetapi memiliki batasan pada beberapa wilayah tertentu dengan faktor yang memiliki intensitas tidak sama. Suatu wilayah tata ruang dapat diartikan sebagai suatu wilayah dengan kutub-kutub pertumbuhan yang memiliki daya tarik bagi daerah disekitarnya. Salah satu faktor pendorong yang penting dalam mengembangkan daerah-daerah disekitar pusat pertumbuhan dalam rangka pelaksanaan pembangunan adalah dengan menggunakan *agglomeration economies* atau pemusatan kegiatan ekonomi.

Menurut Parr (1999), terdapat beberapa strategi dalam pusat-pusat pertumbuhan di suatu wilayah, yaitu: 1) membangkitkan kembali daerah terbelakang, strategi ini dilakukan untuk menciptakan struktur ruang yang lebih kompetitif dan dengan mengkombinasikan antara pergerakan modal secara inter-regional; 2) mendorong dekonsentrasi wilayah, dilakukan untuk menekan tingkat konsentrasi wilayah dan membentuk struktur ruang dari wilayah non-metropolitan; 3) memodifikasi system kota, dilakukan untuk mengontrol urbanisasi menuju pusat pertumbuhan di kota-kota besar; dan 4) pencapaian terhadap keseimbangan wilayah, dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada pada wilayah-wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan wilayah tersebut dan sekitarnya.

Menurut Perroux dalam Tarigan (Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi, 2004), pusat pertumbuhan (*growth of pole*) dapat dibedakan menjadi dua pengertian berdasarkan fungsional dan geografis. Dalam pengertian fungsional, pusat pertumbuhan merupakan titik konsentrasi atau pemusatan gabungan suatu usaha industry dengan hubungan unsur-unsur yang selaras dan berkaitan dan dapat membantu menumbuhkan kegiatan ekonomi ke dalam dan ke luar atau daerah dibelakangnya. Secara geografis, pusat pertumbuhan diartikan sebagai titik dengan banyak kegiatan serta fasilitas yang memberikan kemudahan dan menjadi daya tarik sehingga membuat usaha yang ada tertarik untuk melakukan kegiatan di pusat tersebut serta penduduk yang dapat dengan mudah menggunakan fasilitas yang ada. Namun, tidak setiap kota merupakan pusat pertumbuhan sehingga akan ada

beberapa kemungkinan bahwa tidak banyak terjadi kegiatan atau hubungan antara usaha-usaha tersebut.

Menurut Kuklinski (1972), pusat pertumbuhan menjadi suatu hal yang dapat mendorong perkembangan ekonomi di wilayah pinggiran kota atau sekitar kota. Pusat pertumbuhan memiliki dampak akan terjadinya sebagian penduduk yang berpindah dari luar pusat pertumbuhan karena pusat pertumbuhan memiliki daya tarik serta daya tolak dari daerah disekitar pusat pertumbuhan. Sedangkan menurut Friedman, pusat pertumbuhan yang memiliki kegiatan paling tinggi dengan daerah di sekitarnya menjadi salah satu penyebaran pembangunan karena adanya ketergantungan antar wilayah.

Menurut Tarigan (2004), Pusat pertumbuhan memiliki empat ciri yaitu:

1. Adanya Hubungan Internal dari Berbagai Macam Kegiatan

Hubungan di dalam suatu kota dapat menentukan perkembangan kota karena terdapat sektor-sektor yang saling berhubungan dan tumbuh untuk mendorong perkembangan sektor lainnya.

2. Ada Efek Pengganda (*Multiplier Effect*)

Sektor-sektor yang berhubungan dan saling mendorong dapat menciptakan efek pengganda yang dapat berperan mendorong perkembangan daerah dibelakang atau di sekitar kota. Sektor tersebut dapat membantu peningkatan kebutuhan kota terkait bahan produksi dan juga sumber daya manusia yang dapat digunakan dari daerah sekitarnya.

3. Adanya Konsentrasi Geografis

Pemusatan sektor dan fasilitas dapat meningkatkan efisiensi dengan sektor dan fasilitas lain yang saling berhubungan dan membutuhkan dan berdampak pada peningkatan daya tarik suatu pusat pertumbuhan. Penduduk menuju suatu kota untuk mendapatkan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan dan dipengaruhi oleh lokasi yang berdekatan serta dapat membantu peningkatan skala ekonomi.

4. Bersifat Mendorong Daerah Belakangnya

Kota memiliki hubungan dengan daerah di sekitarnya apabila adanya keterkaitan yang saling menguntungkan. Kota akan membutuhkan bahan produksi dan tenaga kerja dari daerah belakangnya serta membantu

memberikan pelayanan bagi pemenuhan kebutuhan penduduk daerah belakang.

Pusat pertumbuhan di suatu wilayah merupakan suatu lokasi dengan berbagai kegiatan dan karakteristik sebagai berikut (Rondinelli & Ruddle, 1978):

1. Pusat dari kegiatan sosial dan ekonomi dalam rangka penyebaran keuntungan serta meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat di wilayah sekitarnya.
2. Pusat pengorganisasian ekonomi yang menyediakan, menjual, dan melayani bagi daerah belakangnya, serta memberikan peluang beragamnya tenaga kerja.
3. Pusat yang menciptakan suatu inovasi, kreativitas, dan *entrepreneurs* yang bersikap baik dan menjadi teladan bagi lingkungan.
4. Penyedia modal dari pengembalian investasi sebelumnya, untuk menciptakan keuntungan komparatif dan berpeluang untuk pertumbuhan di masa depan.
5. Investasi pada fasilitas umum dan infrastruktur akan menarik kegiatan ekonomi baru yang nantinya akan memperluas fasilitas jasa sosial dan ekonomi yang akan menciptakan siklus pertumbuhan.
6. Konsentrasi pelayanan sosial dan ekonomi di pusat pertumbuhan akan meningkatkan akses jalan yang menuju ke pusat pertumbuhan, dan akhirnya akan menarik aktivitas jasa dan ekonomi baru.
7. Menempatkan kegiatan ekonomi, jasa, fasilitas umum dan infrastruktur di tempat pusat pertumbuhan akan terjadi interaksi dan efek saling melengkapi guna menciptakan pasar baru bagi bahan baku, barang setengah jadi, dan bagi produsen.

2.2.2 Fungsi Kota

Fungsi kota merupakan penentuan kegiatan kota yang ditetapkan berdasarkan hirarki perkotaan dengan indikator berupa kelengkapan fasilitas pelayanan kota (Dirjen Penataan Ruang Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2003). Fungsi kota terdiri dari pelayanan fasilitas-fasilitas umum yang diberikan kepada masyarakat atau penduduk baik fasilitas yang dibuat oleh pemerintah ataupun

badan diluar pemerintah. Fungsi kota dapat menjadi pusat kegiatan pengumpulan dan penyebaran atau distribusi barang serta jasa dengan berbagai bentuk sarana dan prasarana dan aksesibilitas yang memadai (Bratakusumah & Riyadi, 2005).

Berkaitan dengan konteks ruang menurut Tarigan (2005), suatu kota terdiri dari beberapa unsur yang menjadi satu sistem yang tidak dapat berdiri sendiri, terdapat beberapa sistem dalam kota yang mewadahi kegiatan serta fungsi kota di dalamnya dan dilihat dari eksternal bahwa kota juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan yang ada disekitarnya. Di Indonesia, National Urban Development Strategy (NUDS, 1985) memberikan empat fungsi dasar kota, yaitu: *Hinterland Services, Interregional communication, Goods processing (manufacturing), Residential subcenters*.

Berdasarkan fungsi dalam sistem kota, dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, fungsi kota-kota di Indonesia terdiri dari:

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kota-kota yang ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
 - b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi; dan/atau
 - c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi.
 - d. Fasilitas minimum yang tersedia di PKN adalah:
 - i. Perhubungan: pelabuhan udara dan/atau pelabuhan laut dan/atau
 - ii. terminal tipe A
 - iii. Ekonomi: pasar induk antar wilayah
 - iv. Kesehatan: rumah sakit umum tipe A atau B
 - v. Pendidikan: perguruan tinggi
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kota-kota yang ditetapkan dengan kriteria:

- a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;
 - b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten;
 - c. dan/atau kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.
 - d. Fasilitas minimum yang tersedia di PKW adalah:
 - i. Perhubungan: pelabuhan udara, dan/atau pelabuhan laut dan/atau terminal tipe B
 - ii. Ekonomi: pasar induk regional
 - iii. Kesehatan: rumah sakit umum tipe B
 - iv. Pendidikan: perguruan tinggi
3. Pusat kegiatan Lokal (PKL) adalah kota-kota yang ditetapkan dengan kriteria:
- a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan;
 - b. dan/atau kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
4. Pusat Kegiatan Strategis Nasional atau PKSNN ditetapkan dengan kriteria:
- a. pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga;
 - b. pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga;
 - c. pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya; dan/atau
 - d. pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya.

Menurut Richardson (2001), kota memiliki fungsi utama berdasarkan teori *central place* sebagai pusat pelayanan, penyuplai barang-barang dan jasa sentral seperti jasa eceran, perdagangan, perbankan dan profesional, fasilitas pendidikan, hiburan, kebudayaan dan jasa-jasa pemerintahan. Kota sebagai pusat pelayanan diharapkan memiliki fasilitas pelayanan seperti,

- a. Pusat dan pertokoan sebagai focus point dari suatu kota.
- b. Saranan dan prasarana transportasi.
- c. Tempat rekreasi dan olahraga.
- d. Sarana pendidikan, kesehatan, obyek wisata.

Suatu kota memiliki hirarki yang dapat memengaruhi fungsi kota tersebut menurut Randinelli (1983). Kota-kota sedang dan kecil memiliki fungsi yang dapat dibagi kedalam 8 bagian, yaitu: (1) Pusat pelayanan umum dan sosial, (2) Pusat komersial dan pelayanan jasa, (3) Pusat pemasaran dan perdagangan regional, (4) Pusat penyediaan dan pemrosesan produk pertanian, (5) Pusat industri kecil, (6) Pusat transportasi dan komunikasi regional, (7) Pusat penarik migrasi dari pedesaan dan sumber pendapatan bagi daerah pedesaan, (8) Pusat transformasi sosial. Hirarki dalam sistem perkotaan berkaitan dengan fungsi yang diarahkan pada setiap kota yang ada dan berkaitan dengan fasilitas yang dibangun dan tersedia untuk penduduk yang memanfaatkannya baik didalam kota tersebut maupun di wilayah sekitarnya yang dipengaruhi.

Menurut Friedmann (1966), suatu kota sebagai pusat pertumbuhan menyebarkan kegiatan dan aktivitas berdasarkan hirarki dan fungsi dari setiap bagian di dalam kota. Penyebarang fungsi dan hirarki tersebut dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Fungsi Primer

Merupakan pusat pertumbuhan awal yang menjadi rangsangan bagi pertumbuhan di pusat lainnya yang lebih rendah dengan konsentrasi penduduk yang tinggi dan tersebar serta memiliki daerah pengaruh yang kuat dan lebih fungsi yang lebih banyak dibanding pusat lainnya. Salah satunya adalah pusat pemerintahan dan perdagangan bagi seluruh wilayah pusat pertumbuhan tersebut.

2. Fungsi sekunder

Merupakan pusat pertumbuhan dari sub-wilayah dengan tujuan dapat membantu pusat-pusat dalam sub-wilayah dengan lokasi yang jauh dari pusat primer untuk tumbuh. Pusat primer yang tidak dapat menjangkau beberapa pusat yang lebih rendah akan didorong oleh pusat sekunder. Pusat pertumbuhan sekunder dapat menjadi salah satu cara dalam percepatan pemindahan tenaga kerja dari pusat primer karena adanya sektor ekonomi berlebihan.

3. Fungsi tersier

Merupakan pusat pertumbuhan orde ke-3 dalam suatu wilayah dan menjadi titik pertumbuhan bagi daerah disekitarnya. Pusat tersier lebih dipengaruhi oleh pusat yang lebih tinggi di atasnya dan juga berdasarkan lokasi terhadap pusat primer ataupun pusat sekunder.

2.3 Wilayah Pusat Pelayanan dan Wilayah Pengaruh

Teori pusat pelayanan (*central place theory*) yang dikemukakan oleh Christaller diartikan menjadi kesatuan aspek-aspek dasar dalam pemukiman serta dilengkapi pusat-pusat pelayanan di dalamnya. Aspek pemukiman yang termasuk dalam pengertian di atas dapat berupa suatu kota besar, kota-kota kecil, wilayah kota atau satuan lingkungan hunian tertentu. Hartono (2007) menjelaskan teori Christaller mengenai pusat kota yang merupakan pusat bagi daerah sekitarnya yang menjadi penghubung perdagangan dengan daerah lainnya. Menurut Christaller setiap orde memiliki wilayah heksagonal sendiri-sendiri. Bentuk pola pelayanan heksagonal ini secara teoritis mampu memperoleh optimasi dalam hal efisiensi transportasi, pemasaran dan administrasi (Hagget, 2001). Ciri dari pusat pelayanan adalah bahwa pusat tersebut menyediakan pelayanan (komoditas dan jasa) untuk daerah pemukiman itu sendiri dan daerah sekitarnya yang lebih besar (Daldjoeni, Geografi Baru: Organisasi Keruangan dalam Teori dan Praktek, 1997).

Menurut Christaller, suatu pusat kota ditentukan utamanya oleh jumlah penduduk sebagai pengguna dalam fungsi pelayanan fasilitas yang ada dan dengan jumlah penduduk yang tinggi maka fungsi pusat tersebut menjadi penting, dengan contoh sebagai pusat kegiatan perdagangan, pendidikan, pemerintahan, serta rekreasi. Pemusatan suatu kota atau lokasi tidak ditentukan berdasarkan lokasi

wilayah tersebut yang berada di tengah atau pusat kota melainkan terdirinya berbagai kegiatan atau aktivitas serta adanya pekerjaan, barang dan pelayanan di pusat kota. Sedangkan daerah yang menjadi daerah yang melengkapi atau mendukung pusat kota tersebut adalah daerah yang dilayani oleh kegiatan pusat kota (Daldjoeni, Geografi Kota dan Desa, 1998).

Menurut Tjahjati, suatu kawasan dapat tumbuh dan berkembang dipengaruhi oleh adanya aglomerasi atau perkumpulan dari berbagai kegiatan baik sosial maupun ekonomi kota. Hal ini berkaitan dengan kondisi yang terlihat di Indonesia. Di Indonesia, pemusatan kegiatan industri di kota menengah dan kota kecil terdiri dari banyak interaksi kegiatan ekonomi antara kota dengan kota lain ataupun kota dengan wilayah yang dipengaruhinya dan membuat suatu sistem produksi. Wilayah belakang (*hinterland*) atau daerah sekitar suatu kota merupakan wilayah pengaruh dari kota tersebut ketika penduduknya dalam memenuhi kebutuhan atau dan menyalurkan hasil produksi ikut menggunakan dan bergantung kepada fasilitas kota tersebut, termasuk kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, atau rekreasi (Tarigan, Perencanaan Pembangunan Wilayah, 2005). Hubungan antara suatu kota dengan wilayah yang dipengaruhinya bergantung pada jarak. Jarak yang ditempuh maksimum oleh penduduk di suatu wilayah akan menjadi jarak pengaruh dari kota tersebut.

2.4 Interaksi Spasial

Hubungan interaksi spasial di suatu wilayah dikemukakan oleh (Rondinelli dalam Gulo, 2015) merupakan interaksi antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakang atau sekitarnya. Terdapat hubungan dan keterkaitan yang saling membutuhkan dan menguntungkan diantara keduanya. Dalam hubungan interaksi spasial, terdapat keterkaitan dalam kegiatan ekonomi antara wilayah pusat dan daerah sekitarnya sebagai sentral penyalur bahan pokok, pusat pemasaran dari hasil-hasil produksi, pusat pendidikan, penyerap tenaga kerja, sentra perdagangan, pusat pengembangan perkebunan dan pertanian, pusat pangkalan perikanan, dan pusat perhubungan laut dan udara.

Terdapat beberapa hal yang dapat dilihat sebagai contoh keterkaitan ataupun hubungan interaksi antara suatu pusat pertumbuhan dengan daerah di sekitarnya,

sebagai berikut: (1) Keterkaitan fisik (*physical linkages*), merupakan hubungan antara penduduk atau masyarakat dengan sistem transportasi atau jaringan baik yang sudah ada di alam maupun buatan lainnya. Jaringan transportasi buatan yang dibuat digunakan untuk mengurangi waktu tempuh perjalanan sehingga dapat meningkatkan pasar dan juga memberikan peluang ekonomi yang lebih tinggi. (2) Keterkaitan ekonomi (*economic linkages*), merupakan hubungan dengan pasar ataupun pemasaran yang terjadi antara berbagai komoditas jenis bahan, bahan manufaktur, modal dan pendapatan serta hubungan dengan produksi ke depan maupun ke belakang. (3) Keterkaitan pergerakan penduduk (*population movement linkages*), merupakan pola penduduk dalam bermigrasi baik dalam waktu permanen dan sementara. Hubungan ini menjadi gambaran dari keterkaitan antara desa dan kota. (4) Keterkaitan teknologi (*technological linkages*), merupakan hubungan mengenai alat, cara dan metode produksi yang perlu tersistem dalam satu integrasi spasial dan fungsional. Inovasi dalam teknologi belum cukup dalam memacu transformasi sosial dan ekonomi wilayah yang disesuaikan dengan kebutuhan. (5) Keterkaitan sosial (*social linkages*), merupakan akibat dari hubungan dengan ekonomi terhadap kegiatan sosial penduduk. (6) Keterkaitan pelayanan sosial (*service social linkages*), merupakan hubungan dalam memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, listrik, dan bank. (7) Keterkaitan administrasi, politik, dan kelembagaan, misalnya pada struktur pemerintahan, batas administrasi ataupun anggaran dan biaya pembangunan yang direfleksikan dalam hubungan struktural pemerintahan formal, hubungan kegiatan ekonomi antar wilayah dan sosial masyarakat.

2.5 Sintesis Literatur

Sintesis literatur yang didapatkan dari temuan-temuan teori yang sudah dijabarkan dalam tinjauan pustaka dalam Peran dan Fungsi Kota sebagai salah satu Pusat Pertumbuhan dan teori pusat pertumbuhan suatu wilayah. Sintesis literatur ini digunakan untuk mengidentifikasi poin dalam teori-teori yang dijabarkan sehingga dapat menemukan variabel penelitian yang sesuai. Berikut merupakan table ringkasan sintesis literatur yang digunakan:

TABEL II.5 SINTESIS LITERATUR

Sasaran	Literatur	Sumber	Teori	Variabel
Sasaran 1: Mengidentifikasi hirarki pelayanan dan ketersediaan fasilitas pelayanan Kota Metro sebagai salah satu pusat pertumbuhan di Provinsi Lampung.	Fungsi suatu kota	Dirjen Penataan Ruang Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (2003)	Fungsi kota adalah penentuan kegiatan kota yang ditetapkan berdasarkan hirarki perkotaan dengan indikator berupa kelengkapan fasilitas pelayanan kota	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan fasilitas pelayanan
		United Nations (1978)	Hirarki pusat-pusat pelayanan akan mempengaruhi fungsi kota. Penetapan hirarki kota dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas pelayanan di kota tersebut.	
		Jayadinata (1999)	Jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk menunjang supaya suatu fungsi tertentu dapat berjalan lancar	
Sasaran 2: Mengidentifikasi interaksi kegiatan berupa orientasi pemanfaatan fasilitas pada Kota Metro oleh penduduk daerah sekitar.	Peran suatu kota	Rondinelli dan Ruddle (1978)	Peran kota ditentukan oleh aksesibilitas kota terhadap wilayah sekitarnya dan sebagai berikut: a. Merupakan penyedia lokasi bagi kepentingan desentralisasi fasilitas pelayanan publik skala lokal sehingga meningkatkan aksesibilitas antara kota dengan wilayah belakangnya. b. Menciptakan kondisi kondusif bagi perdagangan dari daerah belakangnya. c. Sebagai pusat transportasi dan telekomunikasi yang menghubungkannya dengan kota-kota di sekitarnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Wilayah Pengaruh Fasilitas Pelayanan • Pergerakan penduduk dalam pemanfaatan fasilitas kota

Sasaran	Literatur	Sumber	Teori	Variabel
			d. Memberikan iklim kondusif bagi pertumbuhan industri, yang dapat berfungsi melayani pasar lokal, permintaan internal dan eksternal dengan baik.	
	Kota sebagai suatu pusat pertumbuhan	Rondinelli dan Ruddle (1978)	Pusat pertumbuhan harus merupakan pusat pengorganisasian ekonomi yang menyediakan, menjual, dan melayani bagi wilayah belakangnya, serta memberikan peluang keanekaragaman tenaga kerja	
		Tarigan (2004)	Pusat pertumbuhan memiliki ciri, yaitu bersifat mendorong daerah belakangnya. Hal ini berarti kota dan daerah belakangnya terdapat hubungan yang harmonis. Kota membutuhkan bahan baku dari daerah belakangnya dan menyediakan berbagai kebutuhan daerah belakangnya untuk dapat mengembangkan diri.	
		Daljoeni (1997)	Ciri dari pusat pelayanan adalah bahwa pusat tersebut menyediakan pelayanan (komoditas dan jasa) untuk wilayah pemukiman itu sendiri dan daerah sekitarnya yang lebih besar	
		Tarigan (2005)	Wilayah belakang atau disekitar dikatakan sebagai wilayah pengaruh sebuah kota apabila dalam memenuhi kebutuhannya atau	

Sasaran	Literatur	Sumber	Teori	Variabel
			menjual hasil produksinya cenderung bergantung kepada kota tersebut, termasuk kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, atau rekreasi	

Sumber: Hasil Analisis, 2020

TABEL II.6 KETERANGAN SINTESIS VARIABEL

Sasaran	Variabel	Keterangan
<p>Sasaran 1: Mengidentifikasi hirarki pelayanan dan ketersediaan fasilitas pelayanan Kota Metro sebagai salah satu pusat pertumbuhan di Provinsi Lampung.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan fasilitas pelayanan 	<p>Ketersediaan fasilitas pelayanan yang akan digunakan adalah fasilitas pelayanan dengan skala kota dikarenakan melihat pelayanan fasilitas di Kota Metro terhadap daerah sekitarnya atau antar regional. Fasilitas pelayanan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekonomi • Pendidikan • Kesehatan • Transportasi • Rekreasi dan Olahraga <p>Fasilitas pelayanan yang akan diteliti juga merupakan fasilitas pelayanan yang disediakan langsung oleh pemerintah.</p>
<p>Sasaran 2: Mengidentifikasi interaksi kegiatan berupa orientasi pemanfaatan fasilitas pada Kota Metro oleh penduduk daerah sekitarnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wilayah Pengaruh Pelayanan Fasilitas Kota terhadap Daerah Sekitarnya 	<p>Wilayah pengaruh pelayanan fasilitas kota yaitu seberapa besar jarak maksimal pelayanan fasilitas mampu melayani jumlah penduduk yang ada berdasarkan distribusi persebaran fasilitas dan pusat kegiatan fasilitas.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Pergerakan penduduk dalam pemanfaatan fasilitas kota 	<p>Pergerakan penduduk ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana penduduk di wilayah sekitar Kota Metro dalam memanfaatkan fasilitas pelayanan di Kota Metro sebagai salah satu pusat pertumbuhan di Provinsi Lampung.</p>

Sumber: Penulis, 2020